

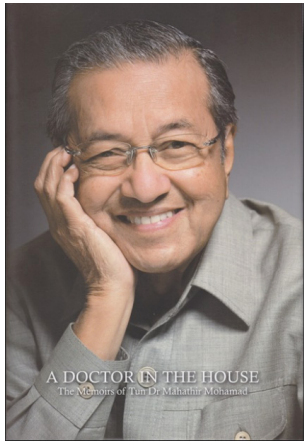
Resensi Buku

BELAJAR DARI INDONESIA UNTUK MEMBANGUN MALAYSIA

Endi Haryono

International Relations Study Program, President University, Jakarta

Korespondensi: Endi Haryono (e-mail: haryono_endi@yahoo.com)



Data buku

Judul : *A Doctor in the House: The Memoirs of Tun Dr Mahathir Mohamad*

Penulis : Tun Dr Mahathir Mohamad

Penerbit : MPH Publishing, Kuala Lumpur

Cetakan : Pertama, 2011

Tebal : 843 halaman

Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia 1981-2003, kerap disebut dengan dua predikat yang kontras di Indonesia: Soekarno kecil dan murid Soeharto. Bagi mereka yang memahami sejarah dan dinamika politik Indonesia, termasuk pasang-surut peran Indonesia dalam politik internasional, dua predikat tersebut terasa sebagai paradoks. Soekarno (populer dengan sebutan Bung Karno, Presiden RI pertama) dan Soeharto (populer dengan sebutan Pak Harto, Presiden RI kedua Indonesia) adalah dua sosok yang berbeda, baik dalam pemikiran maupun tindakan politiknya. Tidak banyak orang dapat sekaligus diasosiasikan dengan kedua sosok ini, terlebih dalam konotasi yang positif untuk keduanya.

Bertempat di Kuala Lumpur, pada 8 Maret 2011, Mahathir meluncurkan memoar yang disiapkannya sekitar delapan tahun. Memoar berjudul *A Doctor in The House:*

The Memoirs of Tun Dr Mahathir Mohamad diterbitkan MPH Publishing setebal 843 halaman dan dijual dengan harga RM 100 (sekitar Rp 290.000,00). Mahathir tidak pernah mengira publik akan menyukai buku tersebut karena ia merasa menuliskannya dengan cukup pedas. Beberapa bagian dari memoar tersebut harus beberapa kali ditulis ulang karena terlalu pedas atau kurang enak dibaca. Mengomentari memoarnya yang menjadi *bestseller* dan mendapatkan perhatian yang demikian besar dari rakyat Malaysia, Mahathir berkomentar “Saya berharap mereka tidak memperlakukan buku tersebut sebagai barang untuk hadiah, tetapi mereka memang membacanya dan mengambil pelajaran darinya” (*The Straits Times*, 5 April 2011).

Mahathir adalah PM Malaysia terpopuler dan paling berhasil dalam pembangunan sosial ekonomi sehingga

kerap disebut sebagai modernisator Malaysia. Tentang hal ini, tidak ada yang tidak sepakat, bahkan termasuk lawan-lawan politiknya. Mahathir adalah pemimpin yang efektif memanfaatkan kewenangan yang dimilikinya untuk memajukan Malaysia, mengubah mental masyarakatnya, dan membawa Malaysia menjadi negara maju. Pembangunan ekonomi nasional yang kuat dan mandiri menjadi tumpuan utama modernisasi negara ini dan untuk sementara, mengesampingkan kebebasan politik. Mahathir dikagumi karena keberhasilannya membangun ekonomi nasional, tetapi pada saat yang sama ia dikritik karena kebijakan politiknya. Barangkali bukan kebetulan ketika dua predikat yang kontras satu sama lain seperti dijelaskan di atas dalam beberapa hal mencerminkan pribadi politik dan prestasi Mahathir memimpin Malaysia.

Pembangunan Ekonomi

Mahathir membangun ekonomi Malaysia dengan menapaki sistem ekonomi terbuka, sama seperti Indonesia dan negara-negara Asia yang lain, Thailand, Filipina, Taiwan, dan Korsel. Kebijakan ekonomi terbuka yang mengikatkan diri dengan kapitalisme global didukung sejumlah prinsip kebijakan, seperti perdagangan bebas, investasi bebas, deregulasi, privatisasi perusahaan negara yang kurang vital, dan valuta asing mengambang.

Kebijakan ekonomi terbuka ini membawa kemakmuran ekonomi bagi negara-negara di Asia sepanjang 1980-an hingga pertengahan 1990-an. Namun, ada kontroversi di kalangan ekonom dan teoretisi politik dalam melihat pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktural masyarakat sebagai akibat dari penerapan ekonomi terbuka. Kalangan ekonom konvensional yang dekat dengan lembaga-lembaga ekonomi global, seperti Bank Dunia dan IMF,

menyebut keberhasilan tersebut adalah riil, bahkan memamerkannya sebagai contoh keberhasilan model pembangunan ekonomi kapitalis. Namun, sejumlah ekonom lainnya memperingatkannya sebagai ekonomi gelembung (*bubble economic*).

Mahathir tersadar ketika menghadapi krisis ekonomi Asia yang diawali dengan kejatuhan mata uang bath Thailand pada Juni 1997. Langkah yang diambilnya saat itu adalah menarik diri dari keterbukaan dan keterkaitan dengan sistem ekonomi kapitalisme global. Mahathir, yang juga mempelajari konsep ekonomi berdikari, memilih menerapkan kebijakan ekonomi nasionalis dengan menolak resep IMF. Kesadaran lebih awal ini membawa Malaysia menjadi negara yang lebih awal pulih dari krisis ekonomi Asia.

Salah satu resep ekonomi nasionalis ala Mahathir dalam menghadapi krisis ekonomi Asia adalah penyelamatan (*bail-out*) perusahaan-perusahaan swasta nasional. Langkah yang saat itu dikecam keras oleh badan-badan ekonomi dunia ternyata justru diadopsi oleh Washington ketika berhadapan dengan krisis ekonomi global menyusul skandal *sub-prime mortgage* tahun 2008-2009.

Politik Luar Negeri

Hanya sehari setelah menjabat PM di tahun 1981, Mahathir mengumumkan kebijakan *buy British last* sebagai protes atas kebijakan Inggris. Mahathir mencanangkan kebijakan luar negeri yang berorientasi pada Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan menengok ke timur (*look east policy*). Setelah kurang berhasil menggalang potensi ekonomi negara-negara Islam untuk menghadapi apa yang disebutnya neoimperialisme barat, Mahathir justru berhasil mendapatkan manfaat nasional dari kebijakan menengok

ke timur, mengambil Jepang dan Korsel sebagai model sekaligus mitra strategis pembangunan ekonomi Malaysia.

Terkait dengan perang saudara dan krisis kemanusiaan di Bosnia-Herzegovina tahun 1992-1993, Mahathir bersuara lantang 'tidak diplomatis' dengan mengecam para pemimpin barat (Inggris dan Amerika Serikat) karena membiarkan berlangsungnya tragedi kemanusiaan di republik bekas Yugoslavia ini. Kemudian pada awal 1990-an, Mahathir menggagas pembentukan Kelompok Ekonomi Asia Timur (East Asia Economic Group/EAEG) yang menyatukan ASEAN, Cina, Jepang, dan Korsel dalam satu blok perdagangan regional. Ini merupakan respons kegagalan perundingan perdagangan internasional dalam putaran General Agreement on Tariff and Trade (GATT) – sekarang Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) – dan menguatnya blok perdagangan regional.

Gagasan Mahathir tentang EAEG, yang kemudian direvisi menjadi Kaukus Ekonomi Asia Timur (East Asia Economic Caucus/EAEC, ditentang oleh AS dan Australia, yang kemudian menekan Jepang dan Indonesia untuk menolaknya. Sebagai gantinya, AS dan Australia mendorong pembentukan Kerja sama Ekonomi Asia-Pasifik (Asia Pacific Economic Cooperation/APEC) untuk mematikan gagasan EAEG. Karena tidak melihat manfaat yang dapat diberikan oleh APEC, yang terbukti tidak berguna bagi negara-negara Asia ketika dilanda krisis ekonomi tahun 1997-1998, Mahathir menolak hadir pada pertemuan puncak pertama APEC di Seattle, AS.

Karena ketidakhadirannya, PM Australia Paul Keating sebagai pemimpin negara yang menggagas APEC menyebutnya sebagai keras kepala (*recalcitrant*). Predikat keras kepala sempat digunakan oleh pers

untuk menyebut Mahathir, tetapi tidak menggantikan predikat "Soekarno kecil" yang telah lebih dulu melekat. Selanjutnya Mahathir hadir dalam pertemuan puncak APEC II di Bogor dengan berat hati sekadar untuk menghormati Indonesia dan Pak Harto sebagai tuan rumah.

Dalam politik internasional dewasa ini, Mahathir melihat Washington sedang berusaha membendung Cina, sekaligus menghalanginya menjadi kekuatan ekonomi dan militer pesaing AS. AS menjaga Cina tetap dalam permusuhan dengan Jepang (kekuatan ekonomi dunia di Asia) dan India (kekuatan ekonomi Asia lainnya yang sedang tumbuh). ASEAN, menurut Mahathir, tidak boleh dimanfaatkan oleh AS untuk menghadapi Cina. Negara-negara ASEAN secara individu tidak dapat bersaing dalam hal ekonomi dengan Cina dan India. Akan tetapi, jika semua negara dalam ASEAN bersatu, maka negara-negara tersebut dapat menjadi mitra ekonomi strategis bagi Cina dan India. Kerja sama tersebut harus dipertahankan.

Tentang Anwar

Bagi pembaca Indonesia, satu hal lain yang menarik yang ingin diketahui dari buku memoar ini, tentu saja, adalah soal Anwar Ibrahim. Pemecatan Anwar dari posisi Deputy PM pada September 1998 di tengah krisis keuangan Asia merupakan peristiwa yang mendapatkan perhatian besar di Indonesia. Sebagaimana diketahui, Mahathir dan Anwar adalah dua nama yang sangat populer di Indonesia, terutama di kalangan intelektual, akademisi, dan umum berpendidikan.

Tentang pemecatan Anwar yang kontroversial, bahkan melintasi batas nasional Malaysia, Mahathir menulis:

"Anwar seharusnya telah menjadi perdana menteri Malaysia pada hari

ini. Tetapi kalau dia tidak menjadi demikian, itu karena ulah dia sendiri. Dia tak memberikan saya pilihan kecuali memecatnya dan saya telah melakukan hal yang saya kira terbaik untuk negara ini ... Saya mungkin telah membuat beberapa kesalahan dalam hidup ini, tetapi memecat Anwar bukanlah salah satunya” (hlm. 698).

Menurut Mahathir, dirinya telah membuat rencana untuk mengundurkan diri pada 1998 se usai Pesta Olahraga Persemakmuran di Kuala Lumpur dan tidak pernah merisaukan bakal penggantinya, yang bermakna Anwar yang bakal menjadi perdana menteri. Krisis ekonomi 1997 membuatnya menunda rencana tersebut karena ia tidak mau mundur ketika Malaysia dalam krisis. Ketika Mahathir menolak didikte kebijakan oleh IMF, Anwar justru condong pada kebijakan ekonomi neoliberal IMF yang dapat mengancam ekonomi Malaysia dan posisi politik Mahathir.

Sebelum peristiwa pemecatan Anwar, pers dan kalangan intelektual Indonesia sangat bersimpati kepada Mahathir, bahkan sejak tahun-tahun awal pemerintahannya. Ketika berlangsung konflik internal Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (United Malay National Organization/UMNO) tahun 1987, yakni ketika kepemimpinan Mahathir di UMNO mendapatkan tantangan dari Razaleigh Hamzah, pemberitaan pers dan komentar-komentar intelektual akademisi Indonesia sangat kentara pro-Mahathir. Mereka melukiskan Mahathir sebagai pemimpin Malaysia dari rakyat biasa yang bersemangat, demokratis, dan berani. Simpati dan dukungan yang sama juga diberikan oleh pers dan kalangan intelektual terhadap Mahathir ketika ia membuat manuver politik mengurangi beberapa hak istimewa Sultan Melayu tahun 1993.

Foto Mahathir yang menangis di tengah pidato pada sidang UMNO 1992, yakni saat beliau menanggapi korupsi yang masih berlangsung di Malaysia dan UMNO, menghiasi halaman muka media-media terkenal di Indonesia. Foto itu sangat membekas dalam ingatan publik Indonesia. Kebetulan saat itu Indonesia juga tengah menghadapi masalah korupsi di pemerintahan yang akut sehingga pers menggunakan foto tersebut untuk mengingatkan pemimpin Indonesia. Kehadiran Mahathir pada KTT Gerakan Non Blok di Jakarta pada 1992 dan pertemuan puncak APEC di Bogor 1994 menjadi subjek favorit pemberitaan media massa dan sekaligus memberi bobot para kedua pertemuan tersebut.

Namun, gambaran manis dan rasa simpatik publik Indonesia terhadap Mahathir berubah pada September 1998 ketika Mahathir memecat Anwar dan terlibat konflik politik dengannya. Simpati dan dukungan media massa dan kalangan intelektual menjadi milik Anwar dan sebaliknya, Mahathir digambarkan secara kurang simpatik.

Akhirnya, Mahathir atau Dr. M, demikian beliau kerap dirujuk, bukanlah ‘Soekarno kecil’ yang mudah dijatuhkan karena menolak dominasi ide serta bukan juga ‘murid Soeharto’ yang pasif dan kurang memahami perubahan politik global. Mahathir adalah seorang politisi dan pemikir politik yang cakap mengambil pelajaran dari sejarah, bukan hanya sejarah Malaysia, tetapi juga sejarah komunitas bangsa Melayu yang lebih luas, juga sejarah Indonesia. Mahathir mengambil pelajaran dari pengalaman Soekarno dan Soeharto untuk menyelamatkan dan memajukan Malaysia sehingga menjadi negara makmur dan berdikari yang di Indonesia sendiri lebih banyak dipidatokan ketimbang dilaksanakan.